DAFTAR BACAAN

A. Buku

Anwar, M. (2020). Kewenangan Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Harjono. (2021). Negara Hukum dan Dinamika Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismail, A. (2023). Konstitusionalitas Perppu dan Kewenangan Presiden. Yogyakarta: UII Press.

Mahfud, M. D. (2021). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Nugroho, A. (2021). Prinsip Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Pratama, D. (2021). Checks and Balances dalam Perspektif Negara Hukum. Yogyakarta: UII Press.

Prayogo, H. (2021). Kewenangan Eksekutif dalam Perspektif Konstitusi. Bandung: Mandar Maju.

Ramadhani, R. (2022). Negara Hukum dan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Bandung: Refika Aditama.

Susanto, F. (2022). Politik Hukum Perppu dan Kewenangan Presiden. Bandung: Refika Aditama.

Wheare, K. C. (2018). Konstitusi-Konstitusi Modern. Bandung: Nusamedia.

Yuliana, S. (2022). Kewenangan Presiden dalam Sistem Presidensial. Malang: UB Press.

Zulfikar, A. (2021). Konstitusi dan Tafsir Kewenangan Darurat Presiden. Surabaya: Airlangga University Press.

B. Jurnal-Jurnal

Ananda, R. (2022). Benturan Kewenangan Presiden dan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum Konstitusi, 19(2), hlm. 59.

Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 153–167.

Darmadi, N. S. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum, 28(2), 1088–1101.

Fauzan, M. (2020). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), hlm. 144.

Fauzan. (2020). Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Konteks Negara Hukum. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 12(2).

Lestari, D. (2020). Kewenangan Presiden dalam Penerbitan Perppu dan

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 17(3), hlm. 219–221.

Mochtar, Z. A. (2021). Diskresi dalam Pemerintahan dan Potensi Penyalahgunaannya di Indonesia. Jurnal Hukum & Kebijakan Publik, 15(3).

Prayitno, C. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Perppu. Jurnal Konstitusi, 17(3), hlm. 513–533.

Rasji, R., Syamila, N., & Michellena, M. (2024). Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 10(1), hlm. 95–106.

Siregar, H. (2023). Implikasi Perppu No. 2 Tahun 2022 terhadap Prinsip Negara Hukum. Jurnal Konstitusi, 20(1), hlm. 102–107.

Tanjung, R. (2021). Eksekutif Heavy dalam Penerbitan Perppu: Studi Konstitusional. Jurnal Hukum dan Politik, 16(2), 201–218.

Utami, P. (2023). Kepatuhan terhadap Putusan MK dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Ketatanegaraan, 21(1), 55–70.

Wijaya, L. (2020). Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Konstitusi dan Demokrasi, 12(4), 311–326.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang

Parameter Kegentingan yang Memaksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materiil Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja